



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HASAN BASRI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 99205

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.795.000.000

1. Tanah Seluas 1713 m2 di BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/88 m2 di BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 648 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 320 m2 di BREBES, WARISAN Rp. 35.000.000
5. Tanah Seluas 520 m2 di BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah Seluas 6695 m2 di BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
7. Tanah Seluas 3150 m2 di BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
8. Tanah Seluas 3340 m2 di BREBES, WARISAN Rp. 500.000.000
9. Tanah Seluas 350 m2 di BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
10. Tanah Seluas 130 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 111.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000



3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1979, HASIL SENDIRI	
Rp. 4.000.000	
4. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.
100.000.000	25.400.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.
D. SURAT BERHARGA	Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.
F. HARTA LAINNYA	Rp.
Sub Total	Rp.
III. HUTANG	Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.
	3.321.783.099
	19.388.000
	3.302.395.099

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **10 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.